

Program ‘BERANI’ UNICEF dalam Pengentasan Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Janelsy Bali Allo

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, Makassar

Corespondence: balialloojanelsy@gmail.com

Abstrak

Child marriage is one of the problems currently faced by Indonesia, with a relatively high rate of child marriage. This study discusses UNICEF's "Berani" Program in eradicating child marriage cases in Bone Regency, South Sulawesi. The author uses a qualitative research method with the aim of describing the research results. The types and sources of data used are primary and secondary, with data collection techniques including in-depth interviews with informants and literature reviews. The research findings indicate that UNICEF has successfully reduced the percentage of child marriages in Bone District, South Sulawesi, by collaborating with multiple sectors to develop policies through the Child Marriage Prevention Strategy Program (SIP-PEKA). This program collaborated with UNICEF and other institutions, ultimately reducing the number of child marriages, which stood at 748 cases in 2019. This figure decreased as 372 villages and neighborhoods in Bone received information about preventing child marriage, resulting in only 84 cases of child marriage in 2021.

Keywords: BERANI, UNICEF, Child Marriage, Bone, South Sulawesi.

Abstrak

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Penelitian ini membahas tentang Program ‘Berani’ Unicef dalam Pengentasan Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada informan dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan UNICEF berhasil menurunkan angka persentase perkawinan anak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan melakukan kerjasama dengan multi sektor dengan melahirkan kebijakan melalui program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak atau SIP-PEKA. Program ini bekerjasama dengan UNICEF dan lembaga lainnya yang akhirnya dapat menekan jumlah pernikahan anak yang saat tahun 2019 sebanyak 748 kasus pernikahan anak. Angka tersebut menurun seiring dengan 372 desa dan kelurahan di Bone yang telah memperoleh informasi mengenai pencegahan pernikahan anak sehingga pada tahun 2021 kasus pernikahan anak berada di angka 84 kasus.

Kata Kunci: BERANI, UNICEF, Perkawinan Anak, Bone, Sulawesi Selatan.

1. Pendahuluan

Data Kependudukan PBB (UNFPA) menyatakan satu dari lima anak berusia di bawah 18 tahun di seluruh dunia, melakukan perkawinan dini dan Indonesia menduduki peringkat ke delapan perkawinan anak terbesar di dunia (UNFPA, 2020). Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia berdasarkan *Child Marriage Report* UNICEF tahun 2020 yaitu 3,5% (UNICEF, 2020).

Angka kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang masih tinggi, dengan praktik perkawinan anak masih sering terjadi di beberapa daerah. Berdasarkan data *Institute of Community Justice* (ICJ) tahun 2019 menyatakan angka perkawinan anak

tingkat provinsi mencapai 1.997 kasus atau sekitar 12,11%. DP3A Sulsel menyebut perkawinan anak pada tahun 2018 sebesar 14,10% (ICJ, 2019).

Selanjutnya, Lembaga Perlindungan Anak menyebut Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat kelima penyumbang angka perkawinan anak di Indonesia dengan angka perkawinan anak di tahun 2017 terdapat 34% perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, angka tersebut lebih tinggi daripada angka nasional dengan 25,7 % serta rata-rata, sekitar 6.500 kasus pernikahan anak per tahun terjadi di Sulawesi Selatan (BPS, Angka Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan, 2017).

Dari sebanyak 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan, lima daerah penyumbang tingginya angka kasus perkawinan anak yakni adalah Kabupaten Pangkep, Wajo, Barru, Tana Toraja dan Kabupaten Bone. Angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone dilaporkan sebagai tiga kabupaten teratas dalam kasus perkawinan anak, yakni 25% (dua kali lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan) dengan jumlah 127 kasus pada tahun 2016 dan 2017 serta 191 kasus pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 mencapai 746 kasus dengan rata-rata peningkatan sekitar 20% per tahun (BPS, Angka Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan, 2020).

Secara internal, Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan berbagai cara untuk mengatasi tingginya tingkat perkawinan anak. Salah satu cara yaitu dengan pemberdayaan anak dengan pemberian informasi dan keterampilan serta jaringan pendukung yang dilaksanakan berupa pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kesehatan reproduksi. Pemerintah provinsi bersinergi dengan berbagai *stakeholder* untuk melakukan upaya dalam mengatasi kasus perkawinan anak. Salah satu upayanya adalah kerjasama dengan organisasi internasional untuk perlindungan anak dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yakni *United Nations Childrens Fund (UNICEF)*.

UNICEF menjadi satu-satunya organisasi dibawah naungan PBB yang mengabdikan diri untuk anak-anak di negara berkembang saat ini. Sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap perlindungan dan isu anak, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Badan ini adalah salah satu badan yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Berbagai program UNICEF menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

Salah satu program UNICEF dalam mencegah kasus perkawinan anak adalah program *Better Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia* atau disebut 'BERANI'. Program 'BERANI' menggunakan pendekatan multi sektor untuk meningkatkan keterampilan hidup remaja dan meningkatkan lingkungan yang mendobrak langgengnya pernikahan anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses pendidikan dan mengatasi norma gender dan sosial yang mengarah pada pernikahan anak. Program 'BERANI' di Kabupaten Bone mulai diimplementasikan sejak tahun 2018 dengan tingginya kasus perkawinan anak sehingga program ini kemudian diharapkan menjadi solusi yang dapat dicapai dengan memastikan keluarga berbasis hak merencanakan, mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender, serta memenuhi

kebutuhan generasi muda akan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di dalam dan di luar sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana implementasi program "BERANI" sebagai bagian dari kerjasama antara pemerintah kabupaten Bone dan UNICEF berdampak signifikan dalam menekan jumlah kasus pernikahan anak di kabupaten Bone ke angka yang lebih rendah dalam periode waktu 2018 hingga 2021. Penelitian ini secara garis besar menyoroti bagaimana efektivitas intervensi UNICEF dalam mengatasi masalah sosial ini.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian yang melalui wawancara mendalam dengan informan dan kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah. Penulis menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan mengenai Program 'BERANI' UNICEF dalam pengentasan kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penelitian kualitatif (Moleong, 2017) adalah penelitian yang bermaksud untuk memhami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya secara holistik yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Dimanadanya primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan dari UNICEF, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara sumber data sekunder yakni telaah jurnal, penelitian yang serupa pada tahun-tahun sebelumnya, jurnal elektronik, website lembaga resmi, media digital dan buku elektronik

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada informan pihak UNICEF dan *library research* atau telaah pustaka dengan menelusuri jurnal, situs web, berita dan media digital. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis hasil temuan dari wawancara dan telaah pustaka lalu data menyajikan data dan menarik simpulan atau verifikasi data hasil temuan.

3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sejak tahun 1948 UNICEF hadir dengan tujuan melindungi hak-hak anak melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat setempat serta sektor swasta dengan komitmen mengupayakan segala daya guna membantu anak-anak khususnya di Indonesia. Dalam hal ini UNICEF mengembangkan 12 kebijakan yang diambil melalui program 'BERANI'. Kebijakan tersebut dikembangkan dengan dukungan dan advokasi 'BERANI' untuk pengentasan kasus perkawinan anak melalui berbagai kebijakan diantaranya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA), Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan yang terakhir Strategi Kabupaten Bone dalam Pencegahan Perkawinan Anak.

Program BERANI meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja perempuan dan laki-laki dalam manajemen kesehatan menstruasi, kesehatan reproduksi, perkawinan anak dan kecakapan hidup. Hal ini termasuk menghilangkan banyak tabu di masyarakat Bone seputar Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan HIV (SRH) serta meningkatkan

lingkungan pendukung yang melanggengkan pernikahan anak (UNFPA, 2023). Selain bekerja sama dengan pemimpin agama perempuan dan mengembangkan peraturan publik, sebagian besar upaya dipusatkan pada penciptaan platform kesehatan di sekolah. Pada tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan hampir 80 persen jumlah pernikahan anak pada lokasi yang didukung oleh program BERANI.

Program ‘BERANI’ yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bone merupakan program tahap I yang bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa perkawinan anak adalah suatu hal yang salah untuk dilakukan. Pada dasarnya, setiap masyarakat desa mengetahui bahwa perkawinan anak adalah salah. Akan tetapi, mereka kurang memahami lebih dalam tentang bagaimana dampak yang dihasilkan ketika anak menikah di usia yang masih sangat muda. Sehingga UNICEF melalui program ‘BERANI’ melalukan banyak program dan inovasi serta sosialisasi tentang dampak dari perkawinan anak dengan melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan pemahaman akan kesadaran masyarakat.



Gambar 3.1 Materi Komunikasi BERANI

Tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Bone memotivasi Pemda melalui Bappeda menjalankan program inovasi yakni SIP PEKA (Strategi Pencegahan Perkawinan Anak). Program ini bekerjasama dengan UNICEF dan lembaga lainnya yang akhirnya dapat menekan jumlah pernikahan anak yang saat tahun 2019 sebanyak 748 kasus pernikahan anak. Angka tersebut menurun seiring dengan 372 desa dan kelurahan di Bone yang telah memperoleh informasi mengenai pencegahan pernikahan anak. Sehingga pada tahun 2021 kasus pernikahan anak berada di angka 84 kasus.

a. Peraturan Desa Anti Perkawinan Anak

Program ini merupakan bagian dari SIP PEKA sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam menekan angka kasus perkawinan anak dengan menerapkan Peraturan Desa Anti Perkawinan Anak dengan memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar. Bappeda menjalankan inovasi ini dengan menyiapkan penguatan kapasitas fasilitator desa, penguatan Puspaga serta MoU antara puskesmas dan sekolah juga komitmen dari Pengadilan Agama dan TP2A.

b. Kolaborasi Multi Sektor

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (SIP-PEKA) dikembangkan sebagai respons terhadap tingginya jumlah perkawinan anak di kawasan perdesaan di Kabupaten Bone. SIP-PEKA melakukan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah dan non-pemerintah seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LPP Bone dan TULODO), Muslimat NU, dan Pers. Program ini ditujukan kepada PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Forum Anak, BKMT, Pokja Desa Sehat, Kelompok Tani, dan sekolah. Uji coba inovasi SIP-PEKA telah dilakukan di 6 desa pilot, dan telah diperluas ke 100 desa, serta Kabupaten Wajo dan Luwu Utara. Bone mengadopsi model BERANI menjadi SIP-PEKA (Strategi Pencegahan Perkawinan Anak) yang direplikasi di 328 desa atau kelurahan di Kabupaten Bone dan berhasil mendapatkan penghargaan TOP 30 KIPP Sulsel dan TOP 45 KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dari Menpan RB (Sulsel, 2021)

Keberhasilan SIP-PEKA dalam pengentasan angka perkawinan anak di Kabupaten Bone membuat UNICEF bakal melanjutkan program tahapan 'BERANI II'. Program lanjutan ini nantinya akan berfokus pada penguatan layanan perlindungan anak yang ada untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak atau hal yang masih belum ada dalam program BERANI I sebelumnya. Program 'BERANI II' nantinya bakal melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini perkawinan anak atau pernikahan siri di desa dengan melibatkan berbagai lembaga atau kelompok masyarakat dan dunia usaha dan melakukan upaya penanganan bagi mereka yang sudah menikah. Program 'BERANI II' yang akan dimulai pada tahun 2024 akan menekankan pada pendekatan konsolidasi dengan memastikan terbentuknya kebijakan pencegahan perkawinan anak yang efektif dan berkelanjutan, melalui harmonisasi kebijakan dan transformasi, upaya penyediaan data dan informasi dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia, UNICEF berfokus mendukung Indonesia mewujudkan hak-hak anak melalui program 'BERANI'. UNICEF berhasil menurunkan angka persentase Perkawinan anak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan melakukan kerjasama dengan multi sektor dengan melahirkan kebijakan melalui program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak atau SIP-PEKA. Program ini bekerjasama dengan UNICEF dan lembaga lainnya yang akhirnya dapat menekan jumlah pernikahan anak yang saat tahun 2019 sebanyak 748 kasus pernikahan anak. Angka tersebut menurun seiring dengan 372 desa dan kelurahan di Bone yang telah memperoleh informasi mengenai pencegahan pernikahan anak sehingga pada tahun 2021 kasus pernikahan anak berada di angka 84 kasus.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Angka pernikahan anak di Sulawesi Selatan*. Makassar: Author.
<https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Angka pernikahan anak di Sulawesi Selatan*. Makassar: Author.
<https://www.bps.go.id>
- Institute of Community Justice. (2019). *Child marriage Indonesia*. Indonesia: Institute of Community Justice.

Jaringan Indonesia Positif Sulawesi Selatan. (2021). *Strategi pencegahan pernikahan anak.* Makassar: <https://jipp-dev.sulselprov.go.id>

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja.

UNFPA. (2023). *BERANI untuk berdaya.* Retrieved 2024, from <https://indonesia.unfpa.org>

UNICEF. (2020). *Child marriage report 2020.* Indonesia: UNICEF.
<https://www.unicef.org/indonesia>

